

MULTIKULTURALISME ARSITEKTUR DALAM PERSPEKTIF TEORI *ASSEMBLAGE*

Keynote Speaker:
Wiryo Raharjo
Universitas Islam Indonesia (UII)

Abstrak

Indonesia memiliki garis pantai 99,000 km - terpanjang di dunia setelah Kanada. Di sepanjang pantai itu berdiri kota-kota yang menjadi titik awal masuknya berbagai pengaruh budaya luar sejak ratusan tahun yang lalu. Di Jawa, selain kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya; Cirebon menjadi titik masuk penting pengaruh budaya luar, yang membentuk citra kota maritim tersebut sebagai kota hibrida dari aspek budaya. Ada warga Cina yang telah bermukim di Cirebon dan pantai utara Jawa (Pantura) sebelum kehadiran VOC, bahkan selain etnis Cina, Cirebon pada masa itu telah dihuni etnis India, Parsi, Siria, Arab, Sunda, Jawa, dan Sumatra, yang membuat karakter Cirebon makin multikultural (Solikhah, 2015). Ko-eksistensi beragam budaya tersebut juga dialami Bali sejak ratusan tahun silam. Sebagaimana ditulis oleh Pigeaud dalam Nordholt (1992), kerajaan Majapahit telah melakukan invasi pada tahun 1343. Pada abad 17, pengaruh VOC di wilayah pesisir utara juga mulai terlihat. Namun catatan VOC menunjukkan bahwa Cina, Muslim, dan bahkan Spanyol serta Portugis telah hadir di Bali sebelum kedatangan VOC itu sendiri (Vickers, 1987). Semua peristiwa tersebut tentu berpengaruh terhadap eksistensi arsitektur di kawasan tersebut. Selain itu dalam perkembangannya, kehadiran globalisasi arsitektur di era modern - yang di klaim Hardy (2003) sebagai “nir-budaya” (*cultureless*) - tentu ikut memberikan kontribusi signifikan terhadap dinamika perubahan lansekap arsitektur di kota-kota tersebut.

Pertanyaan yang akan direspon oleh makalah ini adalah, bagaimana menjelaskan hubungan antara fenomena multikulturalisme tersebut dengan produksi arsitektur? Dimana posisi arsitek dalam konstelasi multikulturalisme tersebut? Penulis mencoba untuk menelaah fenomena tersebut menggunakan teori *assemblage*. Teori ini merupakan interpretasi kritis yang dilakukan oleh DeLanda (2007) dan beberapa cendekiawan lain (misalnya Dovey, 2010; Anderson et al, 2012) terhadap teori *assemblage* karya Deleuze dan Guattari (1987), yang secara khusus diarahkan untuk memahami kompleksitas hubungan sosial masyarakat dengan ruang kehidupannya.

Kata kunci: *assemblage*, multikulturalisme arsitektur, teritorialisasi, deteriorialisasi

Pendahuluan

Pada masa pra-modern, ketika dunia maritim menjadi andalan utama penetrasi budaya asing ke suatu pulau atau daratan, maka kota-kota pesisir Indonesia terbentuk dan berkembang menjadi kawasan yang pertamakali merasakan pengaruh budaya asing tersebut. Indonesia memiliki kota pesisir yang berjumlah 47 (kurang lebih 50% dari jumlah seluruh kota di negeri ini), yang terdiri atas 5 kota metropolitan, 5 kota besar, 32 kota sedang, dan 5 kota kecil (<http://koran.tempo.co/konten/2013/12/16/329978>, diakses tanggal 8 Juni 2016). Cirebon, salah satu kota pesisir tersebut, memiliki karakter arsitektur yang menunjukkan ciri kemajemukan budaya yang telah mengakar berabad-abad lamanya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perkembangan struktur kota ini terbentuk oleh eksistensi 3 kraton, yakni Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan (Gambar 1); kemudian ditambah dengan masuknya Belanda pada abad 16, yang mensahkan status kota ini menjadi *Gemeente Cheribon* pada tahun 1926. Di era *post colonial*, Cirebon mendapat status Kotapraja tahun 1957, dan akhirnya menjadi Kotamadya tahun 1965 (Kusliansjah & Ramadan, 2012). Diluar pengaruh itu, warga kota yang berasal dari berbagai latar belakang budaya juga ikut berkontribusi membentuk karakter “hibrida” kota Cirebon yang kuat (Humaedi, 2013). Mereka berasal dari India, Parsi, Siria, Arab, Sunda, Jawa, dan Sumatra, yang telah menghuni Cirebon sejak sebelum kehadiran VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) – kongsi dagang Belanda (Solikhah, 2015). Hibridisasi kota Cirebon juga tercermin dari makna kata Cirebon itu sendiri yang berasal dari kata “Caruban”- berarti “Campuran” (Kusliansjah & Ramadan, 2012).



Gambar 1. Tiga Kraton pembentuk morfologi awal kota Cirebon

Pada kurun waktu yang kurang lebih sama, Bali juga mengalami penetrasi budaya luar. Bahkan jauh sebelum eksistensi ketiga kerajaan di Cirebon di atas, telah terjadi pengu-

¹ Sumber: <http://travel.grivy.com/h/i/125697503-mengunjungi-keraton-termegah-milik-kota-cirebon>, diakses tanggal 14 Juli 2016.

² Sumber: <http://padma-indah.blogspot.co.id/p/lokasi-wisata.html>, diakses tanggal 14 Juli 2016.

³ Sumber: <http://www.cirebonradio.com/2011/12/keraton-kacirebonan.html>, diakses tanggal 14 Juli 2016.

saan Majapahit atas Bali pada tahun 1343 (Pigeaud dalam Nordholt, 1992), yang kemudian menjadikan warga Hindu Bali terbagi menjadi 2 kelompok besar, yakni kelompok Bali Asli (sering disebut “Bali Aga”) dan Bali keturunan Majapahit (Vickers, 1987). Kemudian Islam yang masuk ke kepulauan Nusantara sekitar abad ke 13, berkembang di beberapa wilayah. Diantara wilayah tersebut yang sampai kini masih menjadi tempat tinggal warga muslim adalah Jembrana, Buleleng, dan Klungkung. Eksistensi muslim di tiga wilayah tersebut secara keseluruhan berkontribusi terhadap populasi warga muslim di Bali, yang kini mencapai kurang lebih 520.000 jiwa - sekitar 13% dari seluruh jumlah penduduk Bali (<http://bimasislam.kemenaq.go.id/post/berita> diakses 12 Juli 2016).

Vickers (1985) menulis bahwa kongsi dagang Belanda VOC yang mulai masuk Bali pada abad 17 melihat Islam sebagai ancaman terhadap eksistensi Belanda di Bali. Oleh karena itu Belanda kemudian menciptakan “sistem proteksi” melalui pendidikan dan peraturan, yang bertujuan untuk mempertahankan identitas Hindu Bali – semacam politik *divide et impera*. Kini diranah arsitektur perkotaan, proteksi terhadap pengaruh luar terlihat pada peraturan bangunan yang diterapkan Pemerintah Daerah Bali, yakni melalui peraturan nomor 5 / Tahun 2005, yang salah satunya mengarahkan para perancang bangunan publik untuk menampilkan bangunan yang menurut pemerintah “berciri Bali” (Gantini, 2009), misalnya dengan komposisi bata merah ekspos yang digosok halus, dengan dekorasi batu atau cor semen berukir (Gambar 2).



(a) Kantor Dinas Kesehatan Kodya Denpasar



(b) Rumah Dinas Wakil Gubernur Bali

Gambar 2. Dua bangunan pemerintah di Bali (Sumber: <http://arsitekbaliblogspot.co.id/2008/12/gedung-milik-pemerintah.html> diakses 14 Juli 2016)

Disamping fenomena tersebut di atas, arsitek-arsitek global juga hadir di Indonesia sejak jaman kolonial. Meskipun pada waktu itu Indonesia diklaim sebagai bagian dari Belanda, namun warga lokal (*inlander*) melihat orang Belanda sebagai *others* (orang lain atau orang asing), walaupun banyak diantara mereka yang lahir di Indonesia. Thomas Karsten, perancang Museum Sonobudoyo Yogyakarta dan beberapa bangunan publik lainnya di negeri ini, adalah salah satunya. Kini didunia yang makin terbuka terhadap mobilitas arsitek internasional, kita melihat banyak arsitek yang berpraktek di Bali, berkolaborasi dengan arsitek lokal. Apakah fenomena arsitek asing yang berpraktek merancang di Indonesia dapat dilihat juga sebagai bagian dari multikulturalisme arsitektur?

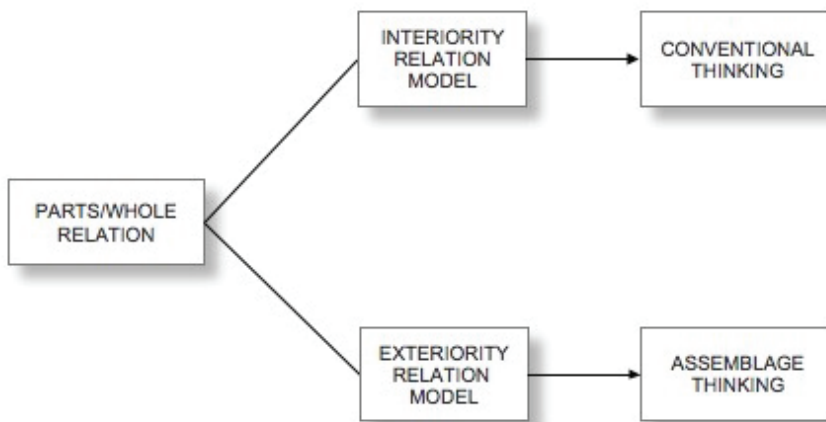
Makalah ini tidak akan membahas atau membandingkan sejarah multikulturalisme Cirebon dan Bali. Tujuan utama makalah ini adalah untuk menelaah fenomena multikulturalisme dalam konteks arsitektur kota. Fenomena ini tidak lepas dari hubungan antara bagian-bagian (*parts* - yang dapat berupa manusia, bangunan, jalan, dan komponen pembentuk lingkungan lainnya) dengan keseluruhan (*whole* – keseluruhan kota atau bagian wilayah kota yang terbentuk oleh jalinan antar komponen tersebut), yang akan ditelaah menggunakan teori *assemblage*. Teori yang dirujuk terutama adalah karya DeLanda (2007) yang mengembangkan dari karya Deleuze & Guattari (1987). Pertanyaan yang akan direspon adalah bagaimana menjelaskan hubungan antara multikulturalisme dengan proses produksi arsitektur? Dimana posisi arsitek dalam konstelasi hubungan “parts/whole” tersebut?

Bagian berikut ini akan membahas dasar-dasar Teori *Assemblage*, dilanjutkan dengan bagian yang membahas penggunaan teori tersebut untuk menganalisis fenomena multikulturalisme arsitektur, dengan kasus Cirebon dan Bali. Unit yang dianalisis mencakup komponen yang dalam teori *assemblage* dikategorikan sebagai komponen teritorialisasi, deteriorialisasi, material, dan ekspresi. Bagian terakhir dari makalah ini membahas tentang posisi arsitek atau perancang bangunan dalam konteks multikulturalisme arsitektur.

Teori *Assemblage*

Arsitektur adalah produk budaya yang proses pembuatannya melibatkan hubungan antar manusia, baik hubungan antar perancang dengan pengguna, perancang dengan pemilik, pemilik dengan pengguna, dan pengguna satu dengan pengguna lain, serta antara mereka semua dengan lingkungan di sekitarnya, termasuk lingkungan non-fisik seperti aturan-aturan yang

dibuat untuk mengendalikan produksi arsitektur tersebut. Hubungan tersebut menjadi makin kompleks ketika kita melihat dalam konteks kota, dimana bangunan satu sama lain saling berinteraksi dengan sistem-sistem pendukung operasionalisasi kota. Dalam diskursus hubungan antara bagian dengan keseluruhan (*parts/whole relationship*), dikenal dua model hubungan, yakni model hubungan “interioritas” (*interiority*) dan model hubungan “ekterioritas” (*exteriority*), sebagaimana diperlihatkan Gambar 3.



Gambar 3. Model hubungan “parts/whole” dan posisi *assemblage thinking* (dikembangkan berdasarkan DeLanda, 2006; Deleuze & Guattari, 1987)

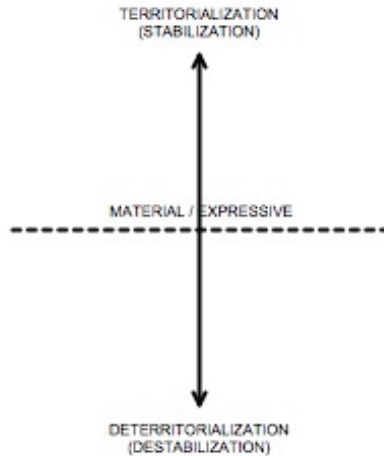
Hubungan “parts/whole” yang terjadi dalam *interiority relation model* dilakukan oleh bagian-bagian (*parts*) yang bersifat “dependent” terhadap keseluruhan (*whole*), yang akan kehilangan fungsinya ketika dipisahkan dari asosiasinya terhadap bagian lain yang menyusun keseluruhan sistem (DeLanda, 2006). Contoh model ini adalah hubungan antara fondasi dan kolom yang berdiri di atasnya dalam sebuah bangunan. Ketika fondasi berdiri sendiri, maka ia tidak menjalankan fungsinya sebagai fondasi. Disisi lain, kolom juga tidak dapat stabil berdiri tanpa fondasi. Jadi model ini melihat bagian-bagian yang menyusun keseluruhan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan (*non-detachable*), sebab jika dipisahkan maka fungsi bagian tidak akan berjalan. Model hubungan interioritas ini yang dominan dibicarakan sehari-hari. Oleh karena itu penulis mengusulkan, pemikiran yang didasari oleh model tersebut disebut sebagai pemikiran konvensional (*conventional thinking*).

Berbeda dari *interiority relation model*, model kedua yang disebut sebagai *exteriority*

relation model, melihat bagian-bagian (*parts*) sebagai komponen yang “independen” terhadap keseluruhan (*whole*). Bagian-bagian tersebut bersifat “detachable” - dapat dipisahkan tanpa kehilangan fungsi masing-masing, dan dapat menjalankan fungsi yang berbeda dalam konstelasi lain tanpa merubah struktur bagian tersebut (DeLanda, 2006). Deleuze dan Guattari (1987) menamakan model ini sebagai *assemblage*¹, dan menggunakan hubungan simbiosis antara lebah dengan bunga sebagai salah satu contohnya. Lebah dan bunga adalah dua bagian yang independen, yang bisa berpisah satu sama lain ketika *event* menghisap madu dan penyerbukan selesai. Lebah kemudian dapat menjalankan fungsi lain, di tempat yang berbeda tanpa berubah strukturnya. Sementara bunga juga dapat berhubungan dengan serangga lain dengan peran yang berbeda, namun struktur tetap sama.

Hubungan dalam *assemblage* bersifat dinamis. Simbiosis antara bunga dengan lebah dapat berjalan normal ketika cuaca baik. Dalam posisi ini, cuaca dikatakan memberikan efek teritorialisasi (stabilisasi) pada *assemblage*. Namun ketika terjadi cuaca buruk atau badai, hubungan antara lebah dengan bunga menjadi terganggu. Disini perubahan cuaca memberikan efek deteriorialisasi (destabilisasi) pada *assemblage*. Selain efek teritorialisasi dan deteriorialisasi, ada bagian lain dari *assemblage* yang dapat menunjukkan karakteristik dari hubungan tersebut, yakni material dan ekspresi yang merupakan satu kesatuan. Pada saat simbiosis berlangsung, bunga anggrek menunjukkan bentuk normal dengan warna putih dan bau tertentu, yang menarik perhatian lebah. Namun perubahan cuaca dan waktu akan memberikan efek deteriorialisasi yang mungkin ditunjukkan oleh layunya bunga tersebut. Bentuk (material) bunga dan warnanya (ekspresi) berubah karena faktor perubahan cuaca dan waktu. DeLanda (2007) mengatakan bahwa hubungan antara keempat komponen *assemblage* tersebut (teritorialisasi, deteriorialisasi, material, dan ekspresi) membentuk perpotongan sumbu (Gambar 4), dimana material dan ekspresi adalah satu kesatuan yang dapat menjadi penanda terjadinya stabilisasi atau destabilisasi.

¹ *Assemblage* adalah kata dalam Bahasa Inggris yang dipakai oleh Brian Massumi, penterjemah buku berbahasa Perancis karya Gilles Deleuze dan Felix Guattari, berjudul *Mille plateaux* (1980) yang menjadi salah satu rujukan makalah ini. Dalam makalah ini penulis belum menemukan padanan kata tersebut dalam Bahasa Indonesia, sehingga penulis tetap menggunakan kata *assemblage*.



Gambar 4. Sumbu konseptual *assemblage* (dikembangkan berdasarkan DeLanda, 2006)

Bagaimana menggunakan teori tersebut di atas untuk menjelaskan fenomena multikulturalisme arsitektur? Bagian berikut ini akan merespon pertanyaan tersebut dengan menggunakan kasus fenomena multikulturalisme Cirebon dan Bali, sebagaimana diuraikan dimuka.

Multikulturalisme arsitektur kota sebagai *assemblage*: kasus Cirebon dan Bali

Sumbu konseptual *assemblage* (Gambar 4) mengisyaratkan bahwa karakter hubungan antara bagian dengan keseluruhan dapat dibaca dengan melihat empat komponen yang mempengaruhi eksistensi sebuah *assemblage*, yakni faktor teritorialisasi, deteritorialisasi, material, dan ekspresi (dari material tersebut). Sosiolog Anthony Giddens (1984) memperkenalkan konsep 'locale', yakni penggunaan ruang sebagai setting interaksi, dimana setting interaksi tersebut menjadi bagian yang penting untuk menjelaskan konteks. Selanjutnya Giddens (1984:118) menjelaskan wujud *locale* sebagai berikut:

Locales may range from a room in a house, a street corner, the shop floor of a factory, towns and cities, to the territorially demarcated areas occupied by nation-states. But locales are typically internally regionalized, and the regions within them are of critical importance in constituting contexts of interaction.

Giddens (1984) lebih memilih menggunakan kata 'locale' daripada 'place' karena kata tersebut tidak hanya mengandung makna fisik seperti 'place', namun juga mengindikasikan adanya

peran agen (dalam hal ini manusia) yang saling bertemu dan berinteraksi. DeLanda (1984) mengklaim bahwa konsep 'locale' ini membantu menjelaskan eksistensi kota sebagai assemblage, tentu ini termasuk juga entitas yang lebih luas seperti pulau.

Teritorialisasi (stabilisasi) Cirebon sebagai kota ditunjukkan oleh eksistensi batas kota yang definitif, yang secara administratif sudah terbentuk pada tahun 1965 (Kusliansjah & Ramadan, 2012). DeLanda (2007) mengatakan bahwa "boundary sharpening" (penajaman batas) suatu kota mencerminkan proses **stabilisasi** kota tersebut. Eksistensi arsitektur sebagai wujud material kota berperan memperkuat atau memperlemah stabilisasi kota, yang ditunjukkan oleh ekspresi dari material tersebut. Sebagaimana dibahas di muka, Cirebon memiliki tiga Kraton yang menjadi pengarah terbentuknya kota tersebut, yang sampai kini masih eksis dan menjadi obyek pelestarian. Penampilan arsitektur ketiga Kraton tersebut merupakan bagian dari **ekspresi material**, yang menunjukkan hibridisasi pengaruh Cina, Jawa, dan Kolonial (Belanda). Keputusan untuk melestarikan bangunan tersebut, baik dalam bentuk peraturan maupun inisiatif lainnya juga memberikan efek **teritorialisasi** yang menstabilkan multikulturalisme arsitektur hibrida Cirebon.

Namun meski batas yang definitif tersebut merupakan bagian dari faktor stabilisasi kota Cirebon, pertumbuhan penduduk kota ini ternyata makin meningkat, sebagaimana dikutip dari salah satu media berikut ini:

Jumlah penduduk di Kota Cirebon terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio peningkatan mencapai 1,93 persen setiap tahunnya. Hingga 31 Desember 2013 pukul 17.00, jumlah penduduk Kota Cirebon mencapai 369.255 jiwa. Dengan luas yang tidak kunjung bertambah secara resmi, ledakan jumlah penduduk perlu dikendalikan (<http://www.radarcirebon.com/jumlah-penduduk-meningkat-jadi-369-255-jiwa.html> diakses 15 Juli 2016).

Pertumbuhan penduduk Cirebon yang terus meningkat, dengan batas wilayah kota yang tak berubah, akan menyebabkan kepadatan kota yang makin tinggi. Meski dari sisi jumlah penduduk, peningkatan tersebut mungkin dapat menjadi faktor **stabilisasi** multikulturalisme warga kota Cirebon, namun dari sisi arsitektur mungkin akan menjadi faktor **destabilisasi**, sebab pertumbuhan penduduk yang tak terkendali akan berdampak pada kebutuhan tempat tinggal, yang pada umumnya diproduksi secara massal dan seragam, dengan penampilan arsitektur global yang dikatakan Hardy (2003) sebagai "nir-budaya" (*cultureless*)

Multikulturalisme di Bali, sebagaimana dibahas dimuka, telah terjadi sejak jaman pra-kolonial. Kontestasi budaya antara Bali Majapahit (yang berasal dari Jawa Majapahit) dan

Bali Aga (sering disebut sebagai “Bali Asli” yang tinggal di wilayah pegunungan di interior pulau Bali) telah menjadi perbincangan sejak lama (Achmadi, 2007). Kini Bali dikenal sebagai tujuan wisata dunia, yang tentu berpengaruh terhadap kekayaan arsitekturnya. Jika multikulturalisme arsitektur dimaknai sebagai ko-eksistensi antara arsitektur lokal yang berakar dari dua budaya Bali tersebut, dengan arsitektur “lain” yang tumbuh di Bali akibat kehadiran banyak investor asing, maka keterbukaan Bali terhadap pengaruh asing dan loyalitasnya terhadap budaya lokal dapat menjadi faktor **stabilisasi** multikulturalisme arsitektur Bali yang terus berubah. Disisi lain, Perda Provinsi Bali Nomor 5, tahun 2005 yang berujuan melestarikan arsitektur “berciri tradisional Bali” (Gantini, 2009) meningkatkan tingkat homogenitas ekspresi unsur material dari *assemblage*, yakni penampilan bangunan yang cenderung sama karena aturan yang harus ditaati tersebut. Jika multikulturalisme arsitektur identic dengan heterogenitas **ekspresi material** dari arsitektur kota-kota Bali, maka Perda Provinsi Bali Nomor 5 / 2005, yang menjadikan penampilan bangunan menjadi cenderung homogen, dapat dilihat sebagai faktor **deteritorialisasi** *assemblage*, yang akan menyebabkan **destabilisasi** multikulturalisme arsitektur di Bali.

Posisi Arsitek

Multikulturalisme arsitektur sebagaimana dibahas di atas, tidak lepas dari peran arsitek sebagai perancang bangunan. Arsitek dalam konteks pemikiran *assemblage* (*assemblage thinking*) dapat dilihat sebagai **bagian** (*part*), seperti lebah dalam proses simbiosis. Namun jika melihat kasus Bali, dimana banyak arsitek asing yang berpraktek di pulau tersebut - bahkan menginspirasi arsitek lokal, maka posisi arsitek sering berada pada situasi ambiguitas. Ini disebabkan karena arsitek dalam melakukan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti keinginan klien, peraturan bangunan, iklim, dan sebagainya. Hotel Four Seasons di Jimbaran, Bali, karya Ground Kent Architect (GKA) yang berbasis di Perth (Australia), adalah contoh kasus (Gambar 5). Hotel yang dirancang oleh arsitek asing terebut tampil dengan “Bali Style”, dan mendapat penghargaan *The Australian Institute of Architects 1996 George Temple Poole Award* (<http://www.gkapertth.com/new-page-1> diakses 15 Juli 2016).



Gambar 5. Hotel Four Seasons, Jimbaran Bali (sumber: <http://www.gkaperth.com/fs-jimbaran-2/5i7lu8vjlb3cy6xtz0phcscb8pdroq> diakses 15 Juli 2016)

Fakta tersebut, yang mirip dengan kasus arsitektur Museum Sonobudoyo Yogyakarta (karya Thomas Karsten), menunjukkan bahwa latar belakang budaya arsitek sering tidak berhubungan dengan penampilan karyanya (**ekspresi** dari **material** dalam pemikiran *assemblage*). Arsitek Australia dapat menghasilkan karya di Bali dengan penampilan yang dalam Perda Provinsi Bali Nomor 5 / 2005 dikatakan “berciri Bali”. Apakah ini bagian dari ketaatan terhadap peraturan? Atau penampilan tersebut adalah respon dari keinginan klien? Makalah ini tidak akan menjawab pertanyaan tersebut. Namun dari dua pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi arsitek dalam konteks pemikiran *assemblage* dapat menimbulkan dua efek sekaligus, yakni **teritorialisasi** dan **deteritorialisasi** terhadap multikulturalisme arsitektur - tergantung pada bagaimana keinginan klien diterjemahkan dalam karyanya.

Kesimpulan

Teori *assemblage* melihat hubungan bagian (*parts*) dengan keseluruhan (*whole*) sebagai jaringan yang kompleks dan heterogen. Bagian-bagian dari *assemblage* tidak harus selalu berada dalam satu ranah. Contoh kasus yang dibahas di atas menunjukkan bahwa kota dapat dilihat sebagai *assemblage* yang bagian-bagiannya tidak selalu bersifat fisik. Manusia yang ada didalamnya

(termasuk arsitek) dapat dilihat sebagai *parts*, demikian pula dengan peraturan yang mengarahkan perkembangan kota (*locale* dalam istilah Giddens, 1984). Teori *assemblage* sekaligus juga menunjukkan bahwa Cirebon dan Bali selalu berada dalam status “Becoming” (terus berkembang) bukan “Being” (dalam posisi akhir), sebagaimana interpretasi Dovey (2010) akan eksistensi tempat (*place*) sebagai *assemblage*.

Multikulturalisme arsitektur dapat dilihat sebagai *assemblage*, tercipta oleh jalinan dari bagian-bagian yang independen, yakni bangunan sebagai **material** yang tampil dengan karakter tertentu (**ekspresi**) yang membentuk relasi eksterioritas dengan bagian-bagian independen lainnya seperti arsitek, peraturan bangunan, klien, dan sebagainya. Bagian-bagian ini yang menjadi obyek analisis untuk menentukan faktor-faktor teritorialisasi dan deterritorialisasi yang mempengaruhi eksistensi multikulturalisme arsitektur tersebut.

Daftar Pustaka

- Achmadi, A. (2007). The architecture of Balinisation: writings on architecture, the villages, and the construction of Balinese cultural identity in the 20th century. PhD thesis, Faculty of Architecture, Building and Planning and Asia Institute, University of Melbourne.
- Anderson, B, Keanes, M, McFarlane, C & Swanton, D 2012, ‘On Assemblages and Geography’ *Dialogues in Human Geography*, vol 2, no. 2, pp. 171-189., 10.1177/2043820612449261
- DeLanda, M. (2006), A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity, London: Continuum
- Deleuze, G. and Guattari, F. (1987), A Thousand Plateaus Capitalism and Schizophrenia, translated by Brian Massumi, Minneapolis: University of Minnesota Press
- Dovey, K. (2010), Becoming Places, London: Routledge
- Gantini, C. (2009), Warna-Warni Arsitektur Bali, dalam Seminar Nasional “Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Binaan” PPI Rektorat Universitas Merdeka Malang, 7 Agustus 2009
- Giddens, A. (1984) The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, Cambridge: Polity Press
- Hardy, A. (2003), Multi-cultural Architecture, in Global Built Environment Review Vol. 3 No. 2 pp. 13-17

- Kusliansjah, K. dan Ramadhan, A. (2012), Struktur Pesisir (Waterfront) Kota Cirebon – Jawa Barat, Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan
- Nordholt, H. S. (1992), *Origin, Descent, and Destruction: Text and Context in Balinese Representation of the Past*, in INDONESIA No. 54 (October 1992), Ithaca: Cornell University South East Asia Program
- Pemerintah Provinsi Bali (2005), Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5, Tahun 2005, tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
- Solikhah, N. (2015), *Kajian Arsitektur Kota Pantai Cirebon dan Strategi Pengembangannya*, dalam “Seminar Eco-Logic City 2015”, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara
- Vickers, A. (1987), *Hinduism and Islam in Indonesia: Bali and the Pasisir World*, in INDONESIA No. 44 (October 1987), Ithaca: Cornell University South East Asia Program